

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Balai Diklat Industri Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas dalam menyiapkan sumber daya manusia industri melalui program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi[1]. Layanan yang diberikan mencakup pelatihan teknis, seminar, sertifikasi kompetensi, serta kegiatan peningkatan keterampilan lainnya yang ditujukan bagi masyarakat umum, pelaku industri, dan lembaga pendidikan.

Selama bertahun-tahun, seluruh kegiatan layanan diklat di BDI Yogyakarta dilaksanakan secara gratis karena sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pola pendanaan seperti ini membentuk proses bisnis di BDI Yogyakarta yang tidak menitikberatkan pada aspek keuangan dari peserta. Dalam skema tersebut, BDI Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, kemudian menyelenggarakan layanan diklat dan menjalin kerja sama dengan asosiasi industri untuk mendapatkan serta mencari peserta. Proses pendaftaran peserta dilakukan dengan cara peserta menghubungi BDI Yogyakarta untuk mendaftar dengan mengisi formulir, yang kemudian datanya dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem informasi diklat internal. Meskipun sistem informasi diklat telah tersedia, penggunaannya terbatas pada pencatatan internal dan pelaporan administrasi yang bersifat konvensional, semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kementerian pusat, bukan untuk mendukung kegiatan layanan yang bersifat komersial[2].

Namun, terjadi perubahan signifikan seiring adanya kebijakan baru mengenai efisiensi pembiayaan dan optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan ini mengakibatkan BDI Yogyakarta tidak lagi mendapatkan anggaran APBN secara penuh untuk operasional layanan diklat. Menanggapi perubahan tersebut, BDI Yogyakarta mengubah model bisnisnya dengan mengimplementasikan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana layanan diklat kini ditawarkan secara berbayar kepada masyarakat dan mitra industri. Pergeseran ini secara fundamental mengubah struktur proses bisnis. Jika sebelumnya tidak ada aktivitas penjualan, kini lembaga harus mengelola layanan diklat

layaknya sebuah entitas jasa, yang menuntut proses pencatatan dan pengelolaan data yang tertib, efektif, dan efisien.

Transformasi model bisnis ini menimbulkan tantangan operasional yang signifikan. Proses bisnis lama yang mengandalkan kerja sama asosiasi industri untuk mendapatkan peserta dan pendaftaran manual tidak lagi relevan atau efisien[3]. Untuk menarik peserta dalam skema berbayar ini, BDI Yogyakarta kini perlu mengintensifkan upaya promosi melalui iklan dan penyebaran informasi yang luas terkait layanan diklat yang tersedia. Lebih lanjut, pendaftaran peserta tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan direncanakan sepenuhnya melalui *website* resmi BDI Yogyakarta[4]. Ketiadaan sistem yang spesifik dan terintegrasi untuk pencatatan dan pengelolaan data layanan diklat berbasis PNBP menyebabkan proses bisnis tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya. Situasi ini mencerminkan bahwa sistem internal yang ada belum memadai untuk mendukung alur bisnis baru yang melibatkan pengelolaan PNBP secara efektif.

Oleh karena itu, fenomena perubahan kebijakan pembiayaan ini menghadirkan sebuah urgensi bagi BDI Yogyakarta untuk menyesuaikan sistem informasi yang dimiliki dengan kebutuhan model layanan berbasis PNBP. Kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat mengelola seluruh siklus layanan berbayar, mulai dari pemasaran, pendaftaran daring, hingga pencatatan dan pengelolaan data kegiatan layanan secara terintegrasi, menjadi sangat krusial. Sistem tersebut tidak hanya akan mendukung efisiensi pencatatan dan alur kerja operasional internal, tetapi juga memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi PNBP[5].

### **3.3 Rumusan Masalah**

Transformasi model bisnis BDI Yogyakarta dari layanan diklat gratis menjadi layanan berbayar berbasis PNBP menimbulkan kebutuhan akan sistem yang terintegrasi. Namun, proses bisnis pengelolaan layanan diklat yang ada saat ini belum didukung oleh sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan data layanan secara terstruktur dan mengelola pemesanan layanan oleh pengunjung secara efisien, sehingga keterbatasan sistem tersebut menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan layanan berbayar dan menghambat adaptasi BDI Yogyakarta terhadap kebutuhan operasional berbasis PNBP.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana mengembangkan sistem berbasis web untuk pencatatan dan pengelolaan data layanan diklat serta pemesanan oleh pengunjung secara efisien dan terintegrasi dalam mendukung mekanisme PNBP di Balai Diklat Industri Yogyakarta?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Merancang dan membangun sistem berbasis web yang mampu melakukan pencatatan dan pengelolaan data layanan diklat untuk mendukung mekanisme PNBP di Balai Diklat Industri Yogyakarta.
2. Merancang dan membangun sistem berbasis web yang dapat memfasilitasi pemesanan layanan diklat secara daring untuk pengunjung, serta memungkinkan pencatatan data pemesanan tersebut.

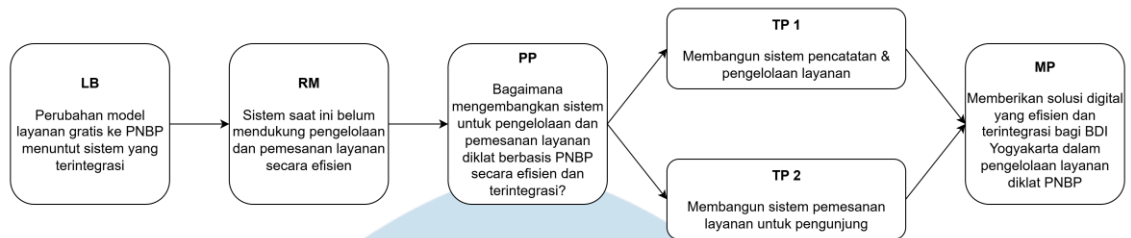
### **1.5 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya mencakup perancangan dan pembangunan sistem berbasis web untuk pencatatan dan pengelolaan data layanan diklat yang ditawarkan oleh BDI Yogyakarta.
2. Sistem yang dikembangkan dibatasi hanya untuk mendukung proses pencatatan pengelolaan layanan dan pemesanan layanan oleh pengunjung, tanpa mencakup fitur transaksi pembayaran.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Layanan Diklat yang dirancang dan dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta berupa penyediaan solusi digital terintegrasi untuk mendukung proses pencatatan dan pengelolaan data layanan diklat berbayar berbasis PNBP, serta mengoptimalkan dan mempermudah alur pemesanan layanan bagi pengunjung dan meningkatkan efisiensi operasional BDI Yogyakarta dalam pencatatan dan pengawasan data layanan beserta data pemesan.

## 1.7 Bagan Keterkaitan



Gambar 1. 1 Bagan Keterkaitan

